

Pro-Kontra Normalisasi Hubungan Diplomatik Israel-Sudan: antara Kepentingan Nasional dengan Solidaritas Pembebasan Palestina

Muhammad Bachrul Ulum

Prodi Magister Bahasa dan Sastra Arab

Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

e-mail : ulumbangsal@gmail.com

Abstract

In 2020, four Arab countries normalized relations with Israel, namely the United Arab Emirates (UAE), Bahrain, Sudan and Morocco. Sudan has been known as a country carrying hard-line Pan-Islamism during the reign of Omar Al-Bashir, so the normalization of relations with Israel is very surprising. Aim of this study is explaining the reasons behind Sudan's agreement to the normalization offer from the US. This study uses a qualitative method with a historical approach to trace the normalization causes and utilizes the concept of "national interest" in foreign policy. This study concludes that Sudan's willingness to normalize its relations with Israel is part of the country's efforts to get off the United States' list of State-Supported Terrorism. The Sudanese government has considered this status as a threat to their national interests, especially in the economic field.

Keywords: *foreign policy, Israel, national interest, normalization, Sudan.*

Abstrak

Pada tahun 2020, empat negara Arab melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, yakni Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, dan Maroko. Sudan selama ini dikenal sebagai negara pengusung paham Pan-Islamisme garis keras selama masa pemerintahan Omar Al-Bashir, sehingga normalisasi hubungan dengan Israel ini sangat mengejutkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan di balik persetujuan Sudan terhadap tawaran normalisasi dari Amerika Serikat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis untuk melacak penyebab terjadinya normalisasi serta memanfaatkan konsep "kepentingan nasional" dalam kebijakan luar negeri. Penelitian ini

menemukan bahwa kesediaan Sudan untuk menormalisasi hubungannya dengan Israel adalah bagian dari upaya negara itu untuk keluar dari daftar *State-Supported Terrorism* versi Amerika Serikat. Status tersebut selama ini dianggap oleh pemerintah Sudan sebagai ancaman terhadap kepentingan nasional mereka, terutama di bidang ekonomi.

Kata kunci: Israel, kebijakan luar negeri, kepentingan nasional, normalisasi, Sudan.

Pendahuluan

Pada tahun 2020, dunia dikejutkan dengan dinamika yang terjadi di Timur Tengah, khususnya yang menyangkut krisis Palestina. Beberapa negara Muslim yang selama ini diharapkan tetap mengusung solidaritas kemerdekaan bagi Palestina telah melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Langkah ini dimulai dari Uni Emirat Arab (UEA) dengan menandatangani Deklarasi Kesepakatan Ibrahim atau Abraham Accords Agreement (*Ittifaqiyat Ibrahim*) di Gedung Putih, pada 15 September 2020. Perjanjian itu ditandatangani oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Nethanyahu, Menteri Luar Negeri UEA Abdullah bin Zayed Al-Nahayan, serta Presiden AS Donald Trump. Dengan ditandatanganinya Abraham Accords ini, UEA menjadi negara Arab ketiga yang telah melakukan normalisasi dengan Israel, menyusul Mesir yang telah melakukan normalisasi tahun 1979 lewat Perjanjian Camp David serta Jordania di tahun 1994 setelah Raja Hussein dan Perdana Menteri Yitzhak Rabin menandatangani Deklarasi Washington (Islamiyah, 2016; Scham dan Lucas, 2001).

Keputusan UEA untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel mendapat respon dari berbagai pihak. Palestina melontarkan kecaman keras. Palestina juga menyerukan agar Liga Arab, selaku organisasi yang bertugas mengurus kepentingan negara-negara Arab di kawasan Timur Tengah, agar menandatangani sebuah komunike kecaman. Menteri Luar Negeri Otoritas Palestina, Riad Maliki, mengatakan bahwa UEA telah melanggar Prakarasa Perdamaian Arab (*The Arab Peace Initiative / As-Salam Al-'Arabiyyah*) dan resolusi KTT Arab, yang salah satu poinnya adalah memberlakukan perilaku normal terhadap Israel, namun tidak boleh sampai pada level normalisasi (Teitelbaum, 2009:14). Namun usulan ini ditolak oleh Liga Arab. Asisten Sekjen Liga Arab, Hossam Zaki, menyatakan bahwa usulan Palestina tentang rancangan komunike tidak disepakati oleh organisasi tersebut.

Sementara itu, Bahrain, Sudan, dan Maroko justru memberikan respon positif dengan mengikuti langkah UEA dalam melakukan normalisasi dengan Israel. Dibandingkan dengan tiga negara lainnya yang melakukan normalisasi dalam kurun waktu yang bersamaan, langkah Sudan ini bisa disebut sangat mengejutkan. Pemerintah Sudan selama ini dikenal sebagai negara yang sangat tegas menolak penjajahan Israel

atas Palestina. Bahkan, di Sudan sejak tahun 1958 telah memberlakukan UU Boikot Israel yang menetapkan hukuman penjara atau denda bagi mereka yang melanggar UU tersebut, misalnya melakukan transaksi perdagangan dengan orang Israel.

Secara demografi, Sudan merupakan bagian dari Arab Aliran Nil dan Tanduk Afrika, dengan stigma sub-wilayah yang cendrung berpaham Islamisme Radikal (Burdah, 2020:131) dan secara lanskap politik dan kebudayaan merupakan *hamzah washl* (penghubung) antara Dunia Arab Barat dan Arab Levant. Selain itu, identitas Islam dalam kehidupan masyarakat Sudan melalui sufisme sangat kuat di kalangan muslim konservatif dan sudah melalui proses politik yang panjang. Berkuasanya Gerakan Al-Mahdi yang memerintah Sudan pada masa Turko-Egyptian dan Anglo-Egyptian memberikan warna tersendiri yang menegaskan bahwa Islam dan politik begitu erat di Sudan (Wahyudi dkk. 2016:252).

Langkah Sudan melakukan normalisasi dengan Israel bisa dikatakan sebagai sebuah transisi yang sangat cepat. Pada tanggal 26 Agustus 2020, Perdana Menteri Sudan, Abdalla Hamdok, secara gamblang menyatakan penolakannya terhadap tawaran normalisasi hubungan dengan Israel. Pernyataan itu disampaikan secara langsung di hadapan Menteri Luas Negeri AS, Mike Pompeo, saat berkunjung di Sudan. Namun, hanya berselang dua bulan, tepatnya tanggal 23 Oktober 2020, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kesediaan Sudan untuk melakukan normalisasi dengan Israel. Dua bulan berikutnya, yaitu tanggal 6 Januari 2021, Menteri Pertahanan Sudan, Nasredden Abdul Bari, dan Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin bersama-sama menandatangani Abraham Accord di Kedutaan Besar AS di Khartoum (Times of Israel, 2021).

Keputusan Sudan untuk mengikuti jejak UEA dan Bahrain ini mengundang banyak respon dari berbagai pihak. Banyak yang mempertanyakan pertimbangan apa yang diambil Sudan sehingga negara ini secara drastis mengubah kebijakan politik luar negerinya. Penelitian ini akan membahas alasan di balik langkah normalisasi tersebut, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Konsep yang digunakan dalam analisis adalah konsep kepentingan nasional yang dikemukakan Burchill. Juga akan dibahas berbagai respon yang diterima Sudan sebagai akibat dari keputusan ini, baik berupa respon yang positif maupun negatif.

Penelitian ini dilakukan dengan secara kualitatif dengan pendekatan historis diakronis, yaitu penulisan sejarah dengan menggunakan pola linear dengan memerhatikan kronologi waktu secara berurutan, dengan tujuan untuk melacak kondisi politik Sudan sebelum dan sesudah normalisasi. Perbandingan di antara dua situasi ini bisa menjadi pertimbangan untuk menggali alasan atau faktor tercetusnya ide

normalisasi yang terjadi saat ini. Penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, dengan sumber buku, dokumen, maupun pemberitaan media massa mainstream, baik dari AS, Israel, maupun Timur Tengah, terutama untuk melacak argumen-argumen di balik fenomena normalisasi.

Normalisasi dan Kepentingan Nasional

Konsep normalisasi dipandang sebagai suatu proses pengakuan kebutuhan dan pengenalan langkah-langkah untuk mengurangi ketegangan atau perselisihan, mempromosikan peningkatan suatu hubungan, serta mengisolasi berbagai ketegangan dan perselisihan tersebut. Konsep ini berisikan langkah-langkah untuk menyelesaikan seluruh atau sebagian akar permasalahan (Totoda, 2017:345). Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa proses normalisasi terjadi ketika didahului dengan adanya ketegangan di antara dua negara, sehingga salah satu di antaranya melakukan pemutusan hubungan diplomatik, baik melalui perang maupun tidak.

Contoh dari normalisasi hubungan adalah perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel tahun 1978. Sebelumnya, kedua negara terlibat ketegangan sampai tahap perang. PBB melalui Dewan Keamanan kemudian mengeluarkan Resolusi nomor 338 yang menyatakan bahwa Israel dan Mesir harus melakukan proses negosiasi, sehingga ditandatanganilah Perdamaian Camp David tahun 1978 (Burdah, 2008:4). Proses negosiasi dan perjanjian damai seperti inilah yang disebut normalisasi.

Kurang lebih ada dua belas poin normalisasi yang biasanya ada pada setiap kesepakatan normalisasi, sebagaimana yang tercantum dalam Abraham Accords (state.gov, 2020), yaitu sebagai berikut.

- a. *Establishment of peace, diplomatic relation and normalization* (mewujudkan perdamaian, hubungan diplomatik, dan normalisasi)
- b. *General principles* (Prinsip-prinsip dasar)
- c. *Establishment of Embassies* (Pendirian Kedutaan Besar)
- d. *Peace and stability* (Perdamaian dan stabilitas)
- e. *Cooperation and agreements in other spheres* (kerjasama dan kesepakatan di bidang lain)
- f. *Mutual understanding and co-existence* (kesepahaman bersama dan hidup berdampingan)
- g. *Strategic agenda for the Middle East* (agenda strategis untuk Timur Tengah)

- h. *Other right and obligation* (hak dan kewajiban lainnya)
- i. *Respect for obligation* (menghormati kewajiban)
- j. *Ratification and entry into force* (ratifikasi dan pemberlakuan)
- k. *Settlement of disputes* (penyelesaian sengketa)
- l. *Registration* (Registrasi)

Sementara itu, kepentingan nasional (*national interest*) merupakan asas kebijakan politik yang bertumpu pada ambisi negara, baik militer, budaya, maupun ekonomi. Orientasi yang dipijak pada dasarnya adalah pengabaian terhadap kepentingan-kepentingan di luar ambisi negara, baik yang bersifat personal maupun internasional (Bainus dan Rachman, 2018:109). Tentu saja, tekanan internasional terhadap sebuah negara merupakan sebuah keniscayaan yang tak terhindarkan. Kepentingan nasional akan selalu berhadapan *head to head* dengan solidaritas antarnegara. Kepentingan nasional akan selalu menimbulkan efek destruktif terhadap kesejahteraan negara lain, dan resiko tersebut akan bertambah bila sebuah negara tergabung dalam satu konsolidasi wilayah maupun ideologi tertentu. Resiko yang paling mudah diramalkan adalah kerelaan sebuah negara yang mengutamakan kepentingan nasional untuk mengundurkan diri dari konsolidasi tersebut. Inilah yang dilakukan Inggris tahun 2016 yang memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa, dikenal sebagai peristiwa British Exit atau Brexit (SD dan Sherin, 2018:157).

Dalam perspektif realisme hubungan internasional, kepentingan nasional menyatakan bahwa prinsip sebuah negara adalah “as it is” atau mengatur dirinya sendiri, sehingga sudah sewajarnya sebuah negara bersifat anarkis dalam politik internasional (Burchill, 2005). *National interest* juga terkait dengan konsep *real-politics*. Menurut Henry Kissinger (Pero, 2010:4), konsep ini bermakna pengutamaan langkah-langkah pragmatis untuk mencapai tujuan negara, terlepas dari etis atau tidaknya langkah yang diambil.

Normalisasi Hubungan Negara-Negara Arab dan Israel

Ada banyak alasan yang dikemukakan oleh negara-negara yang menormalisasi hubungan dengan Israel. Normalisasi sepertinya menawarkan sejumlah keuntungan bagi negara terkait. UAE disebut-sebut melakukan normalisasi dengan Israel dengan alasan untuk meredam ancaman dari apa yang diklaim UEA sebagai bahaya kelompok Syiah dukungan Iran. Dijalinnya normalisasi akan membangun politik “common enemy” antara Israel dan UAE dalam menghadapi Turki dan Iran. Hal ini membuat status kekuatan UAE meningkat di hadapan Iran dan Turki. Bagi UAE, normalisasi ini akan

menjadi jalan keluar bagi konflik Timur Tengah yang berkepanjangan (Guzansky dan Marshall, 2020:2). Poin inilah yang disebut-sebut di dalam Abraham Accord (poin 4 dan 7).

Klaim UEA tersebut dibantah oleh Iran. Bagi Iran, normalisasi UEA dengan Israel malah akan meningkatkan poros perlawanan dan akan membuat situasi di Timur Tengah semakin tidak stabil. Dengan kesepakatan itu, Israel akan semakin leluasa untuk melakukan berbagai macam kekerasan terhadap Palestina, karena bertambahnya negara yang bersikap diam terhadap berbagai kekerasan tersebut. Kementerian Luar Negeri Iran menyebut langkah UEA itu sebagai “kebodohan strategis” (Republika, 2020).

Di sisi lain, Israel juga mendapatkan keuntungan. Dalam kondisi ‘normal’, Israel tidak akan mendapatkan pengakuan diplomatik dari negara-negara Arab Muslim, sebelum negara ini memenuhi persyaratan ini: pertama, menyerahkan Yerusalem Timur kepada Palestina; kedua, mengakui hak kembali orang Palestina; dan ketiga, wilayah kedua negara kembali ke peta tahun 1967. Selama bertahun-tahun, ketiga poin ini telah menjadi misi perjuangan para pemimpin Palestina. Sayangnya, hingga kini, misi tersebut belum juga terwujud (Rehman 2020:76). Karenanya, ketika ada negara Arab yang melakukan normalisasi, tanpa terpenuhinya syarat dari pihak Israel, maka normalisasi ini jelas menguntungkan Israel.

Normalisasi disinyalir sebagai strategi Israel untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan dari negara-negara Arab. Faktanya, dalam beberapa perundingan, Israel sangat sering melakukan pelanggaran (Masyrofah, 2015: 82). Bagi Israel, perdamaian bukanlah tujuan utama. Bagi mereka, tanah adalah segalanya. Perdana Menteri Israel David Ben Gurion pernah mengatakan bahwa perdamaian memang penting. Akan tetapi, tidak untuk ditukar dengan harga berapapun. Itulah prinsip yang menuntun setiap pemimpin Israel selanjutnya (Findley, Astuti, dan Yuliani, 1995:283).

Selepas pernyataan Trump soal kesediaan UEA menandatangani perjanjian normalisasi dengan Israel, Sekjen OKI, Dr. Yusuf Al-Utsaimin, menyatakan bahwa OKI dan negara-negara anggotanya tidak akan mewujudkan normalisasi selama Palestina masih dalam jajahan Israel. Pernyataan tersebut dilontarkan pada 24 Agustus 2020, atau sebelas hari setelah Trump mengumumkan normalisasi hubungan UAE-Israel.

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) adalah lembaga yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan konflik Israel-Palestina. Organisasi yang beranggotakan 57 negara ini didirikan sebagai respon atas pembakaran Masjid Al-Aqsa Yerusalem yang terjadi pada tanggal 21 Agustus 1969 (Dewinta, Windiani, dan Hanura, 2016:128). Sebulan setelah peristiwa pembakaran itu, OKI didirikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pertamanya di Rabat, Maroko, pada tanggal 25 September 1969.

Secara formal, OKI adalah organisasi yang paling konsisten dalam perjuangan pembebasan Palestina, terutama jika dibandingkan dengan Liga Arab yang enggan memberikan reaksi tegas terhadap normalisasi Israel-UAE. Dukungan OKI terhadap perjuangan terhadap Palestina tertuang secara tersurat dalam Piagam OKI (OIC Charter), bahwa seluruh Anggota OKI berjanji untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Di Pasal 21 piagam itu tertulis bahwa Markas Sekjen OKI yang saat ini berada di Jeddah, adalah markas sementara, yang akan dipindahkan ke Al-Quds sebagai markas permanen, di saat Palestina sudah menjadi negara yang merdeka.

Selain itu, OKI juga sangat konsisten memerhatikan berbagai eskalasi pelanggaran HAM yang dilakukan Israel dengan melakukan respon lewat konferensi internasional, misalnya pelanggaran HAM yang dilakukan Ariel Sharon, terhadap warga Muslim Palestina. Peristiwa tersebut direspon melalui KTT OKI ke-9 di Doha, Qatar, tanggal 12-13 November 2000 (Sihbudi, 2007:331). Di KTT ke-9 itu pula OKI merekomendasikan kepada negara anggota untuk melakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel, sebagai wujud solidaritas terhadap Palestina. Ini menunjukkan sikap tegas OKI selaku organisasi terbesar yang menaungi negara-negara Muslim di seluruh dunia terhadap tindakan-tindakan Israel, serta bentuk solidaritas organisasi atas perjuangan saudara Muslim di Palestina.

Sudan: Hegemoni Politik, Konflik, dan Campur Tangan Israel

Awal abad ke-19 menjadi penanda lahirnya nasionalisme. Nation-state disebut-sebut sebagai alternatif baru bagi bangsa-bangsa, terutama di Eropa. Nasionalisme dan nation-state digadang-gadang mampu mengangkat lebih tinggi human right di mata global, setelah sebelumnya terkotak-kotakkan dalam ruas-ruas ideologi masing-masing (Ashaf, 2016:226). Namun sepertinya, hal yang berbeda terjadi di kawasan Timur Tengah. Kawasan yang mulai dikenal dan diperhitungkan kembali keberadaannya pasca Perang Dunia Kedua ini malah mengalami banyak kendala semenjak bersentuhan dengan model pemerintahan nation-state.

Hal ini dapat kita baca melalui pemetaan geopolitik Timur Tengah yang menunjukkan betapa sangat rentannya negara-negara yang sudah menggunakan nation-state; negara-negara tersebut sangat sering menghadapi konflik. Negara-negara di wilayah Arab Levant, Arab Barat, dan Nile Valley merupakan kawasan yang mempunyai riwayat konflik dalam intensitas yang cukup tinggi. Sedangkan wilayah Teluk yang kebanyakan berbentuk monarki, dan dipimpin oleh keluarga-keluarga tertentu malah memiliki riwayat konflik yang relatif rendah.

Sudan sebagai salah satu negara dengan konsep nation-state di kawasan Timur Tengah adalah kawasan yang rawan konflik. Secara garis wilayah, Sudan merupakan

negara yang terletak di wilayah Nile Valley. Sudan merupakan wilayah terluas di benua Afrika, dengan luas mencapai sekitar seperempat dari luas Amerika Serikat (Nydell, 2018:164–65). Sudan merupakan negara yang kaya akan budaya dan suku bangsa, bahkan Sudan disebut sebagai Surah Mushaghara (Mini Map) dari benua Afrika. Namun, keragaman ini sering menjadi pemicu lahirnya konflik internal dalam negeri (Al-Kareem, 2012:43).

Secara garis besar, Sudan merupakan negara yang dihuni oleh dua etnis, yakni etnis Arab yang minoritas dan etnis mayoritas Saharan-African. Meskipun secara kuantitas kecil, etnis Arab sangat mendominasi setiap kebijakan pemerintah. Di Sudan, wilayah utara yang lebih subur diberikan kepada kelompok etnis Arab, sedangkan warga kulit hitam menempati kawasan selatan yang relatif gersang. Selain itu pendapatan dari eksplorasi minyak yang kebanyakan bertempat di wilayah selatan, malah digelontorkan untuk pembangunan kawasan utara, sehingga terciptalah kesenjangan hingga konflik di antara kedua etnis tersebut (Wahiduddin, 2020:51).

Sudan sebelumnya menjadi bagian dari Mesir, sementara Mesir-Sudan berada di bawah penjajahan Inggris, Setelah Mesir merdeka tahun 1922, Sudan pun berjuang ingin memerdekan diri dari Inggris (dan Mesir). Tahun 1952, Mesir dan Inggris mengizinkan Sudan untuk menyelenggarakan referendum, memilih kemerdekaat atau tetap bersatu dengan Mesir. Dalam referendum 1953 itu, mayoritas rakyat Sudan memilih merdeka. Akhirnya, Sudan resmi menjadi negara merdeka pada tanggal 1 Januari 1956 (uca.edu).

Sudan dan Israel punya banyak sekali catatan berdarah, mulai dari konflik Israel-Palestina hingga konflik domestik Sudan yang terindikasi melibatkan Israel. Konflik kedua pihak diawali dengan Perang Enam Hari (Six Day War) pada 5-10 Juni 1967 di antara negara-negara Arab (Mesir, Yordania, dan Suriah) melawan Israel. Ketiga negara tersebut mendapatkan bantuan aktif dari Irak, Kuwait, Arab Saudi, Sudan, dan Aljazair (Iqbal, 2011:156).

Terkait dengan konflik domestik, yang merupakan konflik antaretnis di Sudan, catatan menunjukkan bahwa awal mula munculnya gerakan separatisme di Sudan ternyata mendapat dukungan secara materil dari Israel. Konflik tersebut bermula dari pemberontakan Suku Anya-Nya terhadap pemerintahan Sudan. Konflik dimulai di tahun 1956 dan berakhir di 1972 dengan ditandatanganinya Adis Ababa Agreement, dengan keputusan menjadikan Sudan bagian selatan sebagai daerah otonomi khusus.

Pada tahun 2008, Avi Dichter, mantan Menteri Keamanan Dalam Negeri Israel, secara terbuka menyatakan bahwa sejak kemerdekaan Sudan tahun 1950-an Israel telah memandang bahwa Sudan harus dicegah untuk menjadi kekuatan yang mengancam Israel (Howeidi, 2014). Yang terjadi selanjutnya, Sudan menjadi pembela Palestina dan

membantu Mesir dalam perang melawan Israel. Hal ini membuat Israel melakukan berbagai upaya untuk melemahkan Sudan, antara lain dengan mendukung gerakan pemberontakan. Joseph Lago, saat itu pemimpin organisasi gerilya Anya-Nya ("Viper Venom") Sudan Selatan, memohon dengan putus asa kepada Israel, memintanya untuk membantu mencegah integrasi unit-unit Sudan di dalam tentara Mesir dengan menjepit mereka dalam konflik yang sedang berlangsung dengan para pejuang Sudan Selatan. Ini akan membawa sejumlah keuntungan bagi Israel, termasuk memperkuat koneksi operasional Israel dengan Kenya dan Ethiopia, yang merupakan negara-negara dalam 'lingkaran kedua' geo-strategis Israel (Koren, 2019).

Tahun 2003, konflik kembali berkobar. Kali ini gerakannya lebih sistematis. Kelompok pemberontak muncul di Darfur dengan mengaku atas nama Sudan People's Liberation Movement (SPLM) serta Justice Equality Movement (JEM) (Wahiduddin 2020:51). Perang Darfur dimulai ketika kelompok pemberontak mulai menyerang target-target pemerintah dengan tuduhan bahwa pemerintah telah bertindak diskriminatif, yaitu merepresi kaum kulit hitam Afrika dan memenangkan kaum Arab. Darfur bermakna "tanah kaum Fur" sejak lama menjadi medan konflik perebutan tanah antara kaum Arab melawan komunitas Fur, Massaleet, dan Zaghawa. SPLM dan JEM dihadapi oleh tentara pemerintah dan oleh milisi Arab, Janjaweed. Namun pemerintah Sudan menolak tuduhan bahwa mereka mendukung milisi Janjaweed. Perang Darfur berlangsung selama enam tahun (2003-2009). Menurut PBB, 2,7 juta warga terpaksanya menjadi pengungsi di kamp-kamp pengungsian dan 300.000 orang tewas akibat serangan senjata maupun kelaparan dan penyakit selama perang ini (BBC, 2010).

Jejak Israel dalam Konflik Darfur tahun 2003 terlihat jelas. Avi Dichter, Menteri Pertahanan Dalam Negeri Israel tahun 2012 menyatakan ada tiga prinsip utama dalam strategi militer Israel dalam berbagai ekspansinya. Pemaparan atas ketiga prinsip inilah yang kemudian menjadi bukti keterlibatan Israel dalam konflik Darfur (Al Kareem, 2012: 57-59).

Adapun ketiga prinsip itu adalah: pertama, penggunaan kekuatan militer untuk mengatasi tantangan yang berat, berbahaya, dan sulit diselesaikan tanpa peran militer. Kedua, memperalat kelompok etnis dan sektarian sebagai kekuatan oposisi terhadap target untuk diajak bekerjasama dan mendukung aspirasi mereka untuk berkuasa. Ketiga, membentuk aliansi angkatan laut dengan negara tetangga, yang telah disusun oleh David Ben-Gurion pada pertengahan tahun 1950 bersama Turki, Iran (era monarki Pahlevi), dan Ethiopia.

Dalam kenyataanya, para peneliti menemukan bahwa banyak sekali indikator terkait turut campurnya Israel dalam konflik Darfur. Di antaranya adalah: Israel

menugaskan beberapa perwira militernya untuk memimpin dan melatih gerakan oposisi. John Frank, Mantan komandan Gerakan Pembebasan Sudan ditunjuk sebagai pimpinan Operasi. Tak hanya itu, mereka juga mempersenjatai dan memfasilitasi SPLM/A dalam segi finansial (Abbas, 2020). Pemerintah Sudan juga secara terbuka menyatakan bahwa Israel telah menyuplai senjata kepada pemberontak (Xinhua, 2004). Selain itu, serangan juga dilakukan melalui framing media. Sudan diberi label sebagai pusat “Islam Puritan” yang melakukan pelanggaran HAM atas kelompok minoritas. Seiring dengan tuduhan pelanggaran HAM, embargo ekonomi yang dilakukan AS terhadap Sudan diperketat, bahkan Sudan dimasukkan ke dalam daftar negara yang mendukung aksi terorisme. Pada tahun 2008 dan 2009, Mahkamah Internasional merilis surat tuntutan dan surat penangkapan untuk Presiden Al Bashir dengan tuduhan melakukan kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, dan genosida. Pemerintah Sudah yang bukan penandatangan Mahkamah Internasional menolak tuntutan tersebut (VOA, 2019).

Pada tahun 2005, di bawah tekanan internasional, Al Bashir menandatangani perjanjian damai dengan SPLM yang berisi persetujuan bahwa warga Sudan bagian selatan berhak untuk menentukan apakah mereka mau tetap menjadi bagian dari Sudan, atau tidak. Namun konflik terus berlanjut, sampai akhirnya pada tahun 2011 dilakukan referendum pemisahan diri dan pada 9 Juli 2011 berdirilah Republik Sudan Selatan (VOA, 2019). Warga Sudan Selatan adalah suku-suku yang sebagian besarnya beragama Kristen atau sinkretisme antara Kristen dan kepercayaan tradisional Afrika meskipun bahasa dan budaya mereka sangat dipengaruhi oleh bahasa dan budaya Arab (RA, dkk., 2019). Kemerdekaan Sudan Selatan memberikan dampak ekonomi yang cukup berat bagi Sudan karena Sudan Selatan menguasai ladang-ladang minyak yang sebelumnya menghasilkan tiga perempat dari total produksi minyak Sudan (VOA, 2019).

Embargo Ekonomi terhadap Sudan

Pasca perang Darfur dan pemisahan Sudan Selatan, Presiden Omar Al Bashir masih terus berkuasa hingga tahun 2019. Mulai tahun 2016 rakyat Sudan melakukan berbagai aksi demo hingga puncaknya pada tahun 2019 terjadi demo besar-besaran selama empat bulan, lalu militer menggulingkan Al Bashir. Presiden Sudan yang sudah berkuasa tiga puluh tahun itu ditahan oleh militer dan dihadapkan ke pengadilan Sudan atas tuduhan korupsi dan pembunuhan, serta dalam proses transfer ke Mahkamah Internasional (BBC, 2020).

Selama masa pemerintahannya, Al Bashir memiliki pandangan politik yang condong pada Islamisme. Hal ini berpengaruh kepada kebijakan dan peran negara tersebut atas penyelesaian konflik Israel-Palestina, dengan target kemerdekaan bagi

Palestina. Dukungan Sudan kepada Palestina sudah berlangsung jauh sebelum Al Bashir menjadi presiden, antara lain dengan ditetapkannya UU Boikot Israel 1958. Pasca normalisasi dengan Israel, pada bulan April 2021 kabinet Sudan telah menyetujui penghapusan UU tahun 1958 tersebut (Aljazeera, 2021).

Tahun 1993, pemerintah AS melabeli Sudan sebagai negara pendukung terorisme (State-sponsored terrorism / Al-Daulah Al-Ra'iyah li Al-Irhab) karena negara itu disinyalir menjalin hubungan dengan kelompok yang dicap teroris oleh AS, yakni Al-Qaeda, Hizbullah, dan Hamas (Haris, 2020). Pada tanggal 3 November 1997, pemerintah AS secara resmi menjatuhkan embargo ekonomi terhadap Sudan. Embargo ini menyebabkan dibekukannya semua aset yang dimiliki Sudan, baik yang ada di AS maupun di negara lain. Butir lain dari embargo ini adalah: pihak manapun yang ingin bekerjasama dengan AS, harus memastikan semua barangnya bersih dari keterkaitan apapun dengan Sudan (Wardani, 2020:48). Embargo tersebut berlanjut selama dua dekade. Bahkan, di tahun 2007, Sudan mendapatkan sanksi tambahan akibat isu pelanggaran HAM pada kelompok Sudan Selatan.

Sanksi itu akhirnya dicabut pada tahun 2017. Hanya saja, pencabutan embargo tersebut tidak membuat Sudan lepas dari status state-supported terrorism (negara sponsor terorisme). Hal ini sangat merugikan Sudan, terutama dalam bidang ekonomi. Setelah tergulingnya Al Bashir (2019), Sudan dipimpin oleh pemerintahan transisi yang berbentuk Dewan Kedaulatan (Sovereign Council) yang terdiri dari tokoh militer dan sipil. Jabatan perdana menteri diserahkan kepada Abdalla Hamdok yang sebelumnya menjabat sebagai deputy executive secretary dari Komisi PBB yang khusus menangani ekonomi Afrika (UN Economic Commission for Africa - ECA). Fokus utama pemerintahan transisi adalah perbaikan ekonomi dan untuk itu mereka membutuhkan dana pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan internasional. Status Sudan sebagai negara pendukung terorisme membuat upaya mendapatkan pinjaman ini terhambat.

Dengan alasan inilah, dalam pandangan pemimpin Sudan, satu-satunya jalan untuk membangkitkan ekonominya adalah dengan cara mengupayakan penghapusan status negara itu dari daftar state-supported terrorism, sebuah label yang sepenuhnya berada di bawah kendali Amerika Serikat. Jenderal Momahed Dagalo, Wakil Ketua Dewan Kedaulatan Sudan, menyatakan bahwa AS menjadikan normalisasi hubungan dengan Israel sebagai syarat agar Sudan dibebaskan dari stigma negara pendukung teroris (Republika, 2020).

Dagalo sangat mendukung normalisasi dengan Israel. Dalam pernyataan di televisi Sudan, Dagalo mengatakan,

“Sekarang, suka atau tidak suka, penghapusan Sudan dari daftar pendukung teror terkait dengan normalisasi dengan Israel. Kita butuh Israel ...Israel adalah negara maju dan seluruh dunia bekerja sama dengan Israel. ...Kita akan mendapatkan keuntungan dari hubungan ini. Kami harap semua pihak melihat kepentingan Sudan.” (The Arab Weekly, 2020).

Sementara itu, Perdana Menteri Abdalla Hamdok awalnya masih bertahan meminta AS agar tidak mengaitkan urusan penghapusan Sudan dari daftar negara pendukung terorisme dengan normalisasi Sudan-Israel. Menurut Hamdok, pemerintahan transisi tidak memiliki mandat untuk mengambil keputusan politik yang sangat besar. Umumnya, para tokoh sipil Sudan tidak ingin menormalisasi hubungan dengan Israel, berbeda dengan para tokoh militer (The Arab Weekly, 2020).

Namun akhirnya, pada Oktober 2020, muncul pernyataan resmi bahwa Sudan akan menormalisasi hubungan dengan Israel. Kemudian, pada Januari 2021, Menteri Kehakiman Nasur Aldin Abdul Bari menandatangani Abraham Accords dengan Menteri Keuangan AS, Steven Munich, yang datang ke ibu kota Sudah, Khartoum. Selain Abraham Accords, kedua negara juga menandatangani Memorandum of Understanding mengenai pembebasan tunggakan Sudan ke Bank Dunia sebesar 1 miliar Dollar AS. Sebelumnya, pada Desember 2020, Washington sudah menghapus Sudan dari daftar negara sponsor terorisme (Amin, 2021).

Aspek Kepentingan Nasional dalam Kebijakan Luar Negeri Sudan

Kepentingan nasional merupakan asas kebijakan politik yang bertumpu pada ambisi negara, baik militer, budaya, maupun ekonomi. Selain itu, kepentingan nasional juga bermakna politik riil suatu negara, dimana negara akan mengutamakan langkah-langkah pragmatis untuk mencapai tujuannya. Dalam kasus normalisasi Sudan-Israel, disepakatnya perjanjian itu adalah langkah pragmatis yang diambil secara terpaksa. Sudan sudah berada di sebuah kondisi terjepit dan memandang tidak lagi memiliki langkah alternatif untuk menyelamatkan negaranya dari kehancuran, terutama di bidang ekonomi. Menggandeng Amerika Serikat adalah langkah yang dianggap oleh masuk akal untuk membantu negara ini pulih dan bangkit dari resesi ekonomi. Karena syarat yang diajukan Presiden Donald Trump adalah normalisasi dengan Israel, maka Sudan tidak punya pilihan kecuali mengikuti keinginan Trump tersebut.

Terkait dukungan Sudan kepada Palestina, AS membujuk Sudan dengan menjanjikan bahwa normalisasi dengan Israel itu akan diikuti dengan penangguhan pembangunan 5.400 unit permukiman Yahudi di wilayah Tepi Barat. David Friedman, Dubes AS untuk Israel berjanji bahwa Israel tidak akan melakukan aneksasi terhadap

Tepi Barat. AS mengusung normalisasi sebagai tujuan utama mereka saat ini (Middle East Monitor, 2020).

Sudan juga dijanjikan kerjasama di bidang teknologi, agrobisnis, dan travel dengan Israel. Ketua Dewan Kedaulatan Sudan, Abdel Fattah Al-Burhan, menyatakan bahwa keputusan normalisasi ini adalah "Ittifaq Sulhi Yasubbu fi Maslahat Al-Athraf Jam'iha" atau keputusan terbaik yang bisa dilakukan hingga saat ini. Al-Burhan menyatakan bahwa keputusan ini sudah melalui proses screening dari berbagai pihak. Menurutnya, sebelum keputusan ini diambil, telah dilakukan presentasi draft normalisasi kepada beberapa pihak dari pemerintahan Sudan, di antaranya adalah Majlis As-Siyadah (Dewan Agung), Majlis Al-Wuzara' (Kabinet), Quwa I'lan Al-Hurriyah wa At-Taghyir (Angkatan Kebebasan dan Perubahan), Al-Majlis At-Tasyri'i (Dewan Legislatif) serta Al-Majlis An-Niyabi Al-Intiqali (Dewan Eksekutif Transisi) (Aljazeera, 2020).

Hanya saja, keputusan normalisasi itu menyebabkan Sudan menjadi negara yang dianggap melakukan destruksi nilai moral antar negara, terutama terhadap negara Muslim yang saat itu masih setia untuk mengawal Palestina menuju kemerdekaan yang sesungguhnya. Dalam perspektif real-politik, isu Palestina tak lagi menjadi prioritas yang diperjuangkan Sudan, karena Sudan melihat tekanan internasional, terutama dari AS, dan juga rongrongan Israel atas situasi politik dalam negeri Sudan, sudah tidak bisa lagi dihadapi. Sudan melihat tekanan dan rongrongan itu telah membuat negaranya berada di ambang kehancuran.

Kendati beberapa politisi nasional Sudan menyatakan bahwa normalisasi tak akan mengubah pendirian Sudan dalam bersolidaritas secara kuat kepada Palestina dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina, namun keputusan itu mengecewakan Palestina. Sudan yang selama ini dikenal sebagai negara pendukung Palestina akhirnya bergabung dengan sejumlah negara lainnya yang memilih untuk berdamai dengan negara yang menjajah Palestina, yaitu Israel.

Dukungan atas Normalisasi Sudan-Israel

Keputusan Sudan untuk melakukan normalisasi dengan Israel mendapat apresiasi dari sejumlah pihak, salah satunya adalah dari Liga Arab. Organisasi ini pada dasarnya telah memberikan dukungan atas penandatanganan Abraham Accord yang pertama kali dilakukan oleh UEA. Sikap Liga Arab yang memberikan dukungan terhadap normalisasi ini berbeda bila dibandingkan dengan respon atas tindakan normalisasi Mesir-Israel melalui Perjanjian Camp David tahun 1978. Pada saat itu, selain mengecam langkah Mesir, Liga Arab bahkan sampai menangguhkan keanggotaan Mesir, serta memindahkan markas Liga Arab dari Kairo ke Tunisia. Bagi Liga Arab, tindakan Mesir itu

dianggap telah menentang kesepakatan Uni Arab yang menolak segala bentuk perdamaian dengan Israel (Lesch dan Tessler, 1989:211).

Selain Liga Arab, PBB sebagai organisasi internasional terbesar juga memberikan apresiasinya terhadap langkah normalisasi Sudan-Israel. Sekjen PBB, Antonio Guterres, menyatakan mendukung langkah Sudan sebagai bentuk perbaikan terhadap masalah-masalah sosial-ekonomi, stabilitas, dan kemakmuran di masa yang akan datang. Apresiasi atas keputusan Sudan tentu saja diberikan oleh negara-negara Arab yang sudah terlebih dahulu melakukan langkah serupa. Apresiasi datang dari Mesir sebagai pelopor normalisasi. Presiden El Sisi mengungkapkan bahwa langkah yang diambil Sudan adalah perjuangan yang sangat berharga untuk mewujudkan stabilitas dan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Bahrain dan UEA juga menyambut gembira keputusan Sudan ini.

Negara-negara Barat juga memberikan apresiasi secara terbuka, antara lain pemerintah Jerman melalui laman twitter resmi Kantor Kementerian Luar Negeri menyambut keputusan Sudan itu sebagai sebuah langkah penting untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian yang lebih luas antara Israel dan negara-negara Arab. Perdana Menteri Israel juga menyambut keputusan Sudan ini dan menyebut kesepakatan ini sebagai “dimulainya era baru” dan pihaknya akan segera bertemu untuk membahas perdagangan dan kerja sama bidang pertanian (dw.com, 2020)

Penolakan Normalisasi Sudan-Israel

Selain mendapat banyak apresiasi, banyak pula pihak yang mengcam keputusan Sudan karena tidak lagi menunjukkan solidaritas yang kuat kepada Palestina. Keputusan Sudan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap Palestina dan komitmen OKI untuk membebaskan Palestina dari cengkeraman Israel yang tertuang dalam OIC Charter. Presiden Otoritas Nasional Palestina sekaligus ketua Palestine Liberation Organization (PLO) Mahmoud Abbas mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan normalisasi UAE, Bahrain, Sudan, dan Maroko terhadap Israel. Mahmoud menilai keputusan tersebut melanggar resolusi KTT Liga Arab dan OKI, Prakarsa Perdamaian Arab (The Arabs Peace Initiative) dan Resolusi DK PBB nomor 1515 tahun 2003 tentang penyelesaian konflik Israel-Palestina (Security Council of United Nations 2003). Selain itu, OKI melalui Sekjen Yusuf Al-Utsaimin juga menolak tawaran normalisasi. Bagi Yusuf, tidak ada normalisasi sebelum Israel menghentikan penjajahan.

Kementerian Luar Negeri Iran melalui akun twitter resminya juga mengirimkan cuitan bahwa AS telah “memeras” Sudan. Harga yang harus dibayar untuk keluar dari list negara pendukung teroris adalah dengan melakukan normalisasi hubungan dengan penjajah Israel, serta membayar tebusan sebesar 355 Juta Dollar AS atas kerugian yang

ditimbulkan oleh serangan Al Qaeda terhadap Kedutaan Besar AS di Kenya dan Tanzania tahun 1998. Langkah Sudan yang menerima syarat berat yang diajukan AS agar dikeluarkan dari daftar negara pendukung teroris dinilai Iran sebagai sikap pengecut (Reuters, 2020).

Kecaman juga datang dari organisasi dan milisi perjuangan anti-Israel, di antaranya adalah Hizbullah. Milisi bersenjata asal Lebanon ini mengungkapkan bahwa pilihan Sudan adalah keruntuhan sebuah bangsa dalam hal politik dan moral (Seth, 2020). Sudan yang dulunya terkenal sebagai negara Islamis yang kuat dengan ideologinya kini harus berpisah haluan dengan Hizbullah. Bahkan, Sudan juga harus mengambil langkah yang sama dengan AS dan Israel, yaitu menetapkan milisi-milisi bersenjata semisal Hizbullah, Hamas, dan Ansharullah Yaman sebagai organisasi teroris.

Kecaman juga datang dari dalam negeri Sudan. Berbagai demonstrasi dan penolakan muncul dari berbagai pihak. Mantan Perdana Menteri Sudan serta Pimpinan partai terbesar Sudan, Partai Nasional Umat (National Umma Party / Hizb Al-Ummah Al-Qaumy) Sadiq Al-Mahdi menolak dengan keras keputusan Sudan menerima tawaran normalisasi. Al-Mahdi menilai tawaran tersebut adalah bukti politik rasis yang masih dijalankan Trump (Haaretz, 2020). Aksi-aksi demo juga terjadi dimana rakyat Sudan menyatakan penolakan mereka atas normalisasi ini. Penolakan dari dalam negeri menunjukkan bahwa identifikasi “kepentingan nasional” yang dikemukakan elit pemerintah belum tentu sejalan dengan kepentingan nasional dalam persepsi masyarakat.

Simpulan

Sudan adalah negara yang semula sangat tegas mendukung Palestina, antara lain menyatakan boikot terhadap Israel, membantu Mesir saat berperang melawan Israel tahun 1967, serta menolak hubungan diplomatik dengan Israel. Israel juga terbukti melakukan berbagai upaya untuk mendestabilisasi Sudan. Namun, pada tahun 2020, Sudan mengambil keputusan mengejutkan, yaitu bersedia menormalisasi hubungannya dengan Israel.

Dinamika politik dalam negeri Sudan yang ditandai dengan kudeta terhadap Presiden Omar Al-Bashir oleh militer negara itu tahun 2019. Hal ini menjadi faktor penting berubahnya kebijakan luar negeri Sudan. Sudan di bawah kepemimpinan Omar Al-Bashir selama ini bersikap keras terhadap campur tangan Israel dalam mendukung segala kebutuhan pemberontakan Sudan Selatan.

Tumbangnya Omar Al-Bashir membuka jalan bagi Israel dan AS untuk menekan Sudan yang secara ekonomi memang sangat membutuhkan bantuan internasional. Di

antara alasan yang akhirnya mendorong disetujuinya tawaran normalisasi antara Israel dengan Sudan adalah situasi krisis ekonomi yang dialami Sudan akibat dari keputusan Amerika Serikat untuk memasukkan Sudan dalam daftar negara-negara yang diduga mendukung terorisme. Keputusan inilah yang akhirnya membuat Sudan diembargo secara ekonomi dalam lingkup internasional.

Dengan menggunakan konsep kepentingan nasional yang dikemukakan Burchill dan Kissinger, keputusan sebuah negara dipandang sebagai upaya untuk meraih kepentingan nasional. Dengan demikian, keputusan Sudan untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel dianggap langkah yang mempertimbangkan kepentingan nasional.

Dukungan dan penolakan atas keputusan Sudan itu merupakan resiko yang harus diterima oleh negara itu. Ideologi Pan-Arabisme yang diprakarsai Liga Arab serta organisasi internasional seperti PBB secara umum cenderung mendukung keputusan Sudan untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Sedangkan pendukung dan simpatisan Pan-Islamisme yang diprakarasai OKI cenderung mengecam dan menolak keputusan normalisasi, karena sikap ini dianggap mengingkari janji bersama yang termaktub dalam Piagam OKI, Prakarsa Perdamaian Arab, dan Resolusi DK PBB 1515. Penolakan yang muncul dari dalam negeri Sudan, yaitu berupa protes dan aksi-aksi demo massa. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan nasional dalam persepsi elit belum tentu menjadi kepentingan nasional dalam persepsi rakyat.

Daftar Pustaka

- العلاقات الاسرائيلية مع دولة جنوب السودان وتداعياتها على الأمن القومي العربي. " " Abbas, H.R. (2020). Diambil 17 Januari 2021 (https://www.democraticac.de.w0124385.kasserver.com/?p=67058).
- Amin, M. (2021). Sudan signs deal to normalize relations with Israel. Aa.com, [online]. Dalam: https://www.aa.com.tr/en/africa/sudan-signs-deal-to-normalize-relations-with-israel/2100349 [Diakses 24 Februari 2021].
- Aljazeera. (2021). Sudan's cabinet votes to repeal Israel boycott law. [online]. Dalam: https://www.aljazeera.com/news/2021/4/6/sudanese-cabinet-votes-to-repeal-israel-boycott-law [Diakses 23 Februari 2021].
- تطبيع السودان وإسرائيل.. حزب المهدى ينفي تصريحات البرهان وواشنطن تمضي بإزاله " " Aljazeera. 2020. قائمة من الخرطوم الإرها [online]. Dalam: (تطبيع-السودان-إسرائيل/). [Diakses 23 Februari 2021].

- Al-Kareem, I.A. (2012). The Israeli Role in Darfur Crisis. *Journal of the Center Palestine Studies*, [online] 16, 43-64. Dalam: <https://www.iasj.net/iasj/article/64487> [Diakses 23 Februari 2021].
- Art, R. J. (2013). *A grand strategy for America*. New York: Cornell University Press.
- Ashaf, M.A. (2016). Akar Epistemik Hegemoni Politik Barat terhadap Nasionalisme di Timur Tengah. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* [online] 24(2). Dalam: <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/view/954> [Diakses 23 Februari 2021].
- Bainus, A. dan Rachman, J.B. (2018). Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional. *Intermestic: Journal of International Studies*, 2(2), 109–15.
- BBC. (2010). Omar Bashir: ICC delegation begins talks in Sudan over former leader. [online]. Dalam: <https://www.bbc.com/news/world-africa-54548629> [Diakses 23 Februari 2021].
- Burchill, S. (2005). *The national interest in international relations theory*. New York: Palgrave Macmillan.
- Burdah, I. (2008). *Konflik Timur Tengah*. Jakarta: Tiara Wacana.
- Burdah, I. (2020). Quo Vadis Dunia Arab Kontemporer? Gerakan Protes, Politik Muslim, Covid-19, dan Arah Perubahan. [online] UIN Sunan Kalijaga. Dalam: <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40806/> [Diakses 23 Februari 2021].
- Cahyanti, P. (2017). Analisis Konflik Sudan Dan Sudan Selatan Pasca Referendum Pemisahan Diri Sudan Selatan Dari Sudan. *Journal of International Relations*, 3(4), 84–95.
- Dewinta, R,T,A., Windiani, R., dan Hanura, M. (2016). Peran Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Dalam Menangani Konflik Etnis Rakhine-Rohingya Di Myanmar Tahun 2012-2013. *Journal of International Relations*, 2(2), 127–34.
- dw.com. (2020). Sudan to Normalize Ties with Israel, Says US | DW | 23.10.2020. [online]. Dalam: <https://www.dw.com/en/sudan-to-normalize-ties-with-israel-says-us/a-55378202> [Diakses 18 Januari 2021]
- Findley, P., Astuti, A., dan Yuliani, L. (1995). *Diplomasi munafik ala Yahudi: mengungkap fakta hubungan AS-Israel*. Bandung: Mizan.
- Guzansky, Y., dan Marshall, Z,A. (2020). The Abraham Accords: Immediate Significance and Long-Term Implications. *Israel Journal of Foreign Affairs*, 14(3), 379-389.

- Haaretz. (2020). Head of Sudan's Largest Party Slams Recognizing Israel. [online]. Dalam: <https://www.haaretz.com/israel-news/head-of-sudan-s-largest-party-slams-recognizing-israel-1.9258920> [Diakses Diambil 18 Januari 2021]
- Haris,A.M. (2020). Sudan Kini Sekuler. [online] UIN Surabaya. Dalam: <https://w3.uinsby.ac.id/sudan-kini-sekuler/> [Diakses 18 Januari 2021].
- Howeidi, F. (2014). Israelis can tell the whole story of Sudan's division - they wrote the script and trained the actors. Middle East Monitor, [online]. Dalam: <https://www.middleeastmonitor.com/20140125-israelis-can-tell-the-whole-story-of-sudans-division-they-wrote-the-script-and-trained-the-actors/> [Diakses 20 Februari 2021].
- Iqbal, A. (2011). Perang Perang Paling Berpengaruh Didunia. Jogja: Bangkit Publisher.
- Islamiyah, N. (2016). Aspek Historis Peranan PBB Dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel 1967-1995. Avatar , 4(3).
- Koren, H. (2019). South Sudan and Israel: A love affair in a changing region?. [online] Dayan. Dalam: <https://dayan.org/content/south-sudan-and-israel-love-affair-changing-region> [Diakses 18 Januari 2021].
- Lesch, Mosely, A., dan Tessler, M. (1989). Israel, Egypt, and the Palestinians. From Camp David to Intifada. Bloomington: Indianapolis.
- Masyrofah, M. (2015). Fakta Perjanjian Damai Dan Hubungan Diplomatik Negara Timur Tengah Dalam Proses Perdamaian Konflik Israel-Palestina Pasca Kemerdekaan Palestina. Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i, [online] 2(1). Dalam: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/2243> [Diakses 20 Maret 2021].
- Middle East Monitor. (2020). "Washington: 'Normalisation Serves Israel Better than Annexation" [online] Dalam: <https://www.middleeastmonitor.com/20201003-washington-normalisation-serves-israel-better-than-annexation/>. [Diakses 18 Januari 2021].
- Nydell, M, K. (2018). Understanding Arabs: A contemporary guide to Arab society. London: Nicholas Brealey.
- Ottaway, M., dan El-Sadany, M.. (2012). SUDAN: From conflict to conflict. Carnegie Endowment for International Peace, (8).
- Pero, M, D. (2010). The Eccentric Realist: Henry Kissinger and the Shaping of American Foreign Policy. New York: Cornell University Press.

- RA, F. Rosyana., Dermawan, W., dan Akim. (2019). Conflict Resolution in South Sudan. Jurnal ICMES, [online] 3(1), 53–74. Dalam: <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v3i1.44> [diakses 18 Februari 2021].
- Rehman, A, Ur. (2020). Causes behind the Abraham Accord and Its Consequences for the Peace Process in the Middle East. The Middle East International Journal for Social Sciences (MEIJSS), [online] 2(2), 73-83. Dalam: doi: 10.5281/ZENODO.4314077 [diakses 26 Maret 2021].
- Republika. (2020). Sudan Ditekan AS Normalisasi Dengan Israel. [online]. Dalam: <https://republika.id/posts/10725/sudan-ditekan-as-normalisasi-dengan-israel%C2%A0> [Diakses 18 Januari 2021].
- SD, H. Alunaza, dan Sherin, V. (2018). Pengaruh British Exit (Brexit) terhadap kebijakan pemerintah Inggris terkait masalah imigran. Intermestic: Journal of International Studies 2(2), 156–170. Dalam: doi:10.24198/intermestic.v2n2.4 [Diakses 18 Januari 2021].
- Security Council of United Nations. (2003). Resolution 1515 (2003). [online] Dalam: [https://undocs.org/S/RES/1515\(2003\)](https://undocs.org/S/RES/1515(2003)) [Diakses 18 Januari 2021].
- Scham, P., dan Lucas, R. (2001). Normalization and Anti-Normalization in Jordan : The Public Debate. Middle East, 5(3), 55.
- Seth J, F. (2020). Hezbollah Threatens Sudan over Israel-Sudan Ties. JPost.Com, [online]. Dalam: <https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/hezbollah-threatens-sudan-over-israel-sudan-ties-647371> [Diakses 18 Januari 2021].
- Sihbudi, M, R. (2007). Menyandera Timur Tengah: Kebijakan AS dan Israel atas Negara-negara Muslim. Bandung: Mizan Hikmah.
- State.gov. (2020). Abraham Accords Peace Agreement. [online] Dalam: https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/09/UAE_Israel-treaty-signed-FINAL-15-Sept-2020-508.pdf [Diakses 8 Januari 2021].
- Reuters. (2020). Iran Says U.S.-Brokered Sudan-Israel Deal Secured by 'Ransom. [online] Dalam: <https://www.reuters.com/article/uk-sudan-israel-iran-idUSKBN2790B4> [Diakses 24 Februari 2021].
- Teitelbaum, J. (2009). The Arab Peace Initiative: A Primer and Future Prospects. Jerusalem: Jerusalem Center of Public Affairs (JCPA)
- The Arab Weekly. (2020). Sudanese leaders divided on normalisation with Israel. <https://thearabweekly.com/sudanese-leaders-divided-normalisation-israel>

- Times of Israel. (2021). Sudan Signs 'Abraham Accords' with US, Paving Way for Israel Normalization.. [online]. Dalam: <https://www.timesofisrael.com/sudan-signs-abraham-accords-with-us-paving-way-for-israel-normalization/> [Diakses 15 Januari 2021].
- Totoda, F, F. (2017). Upaya Amerika Serikat dalam Normalisasi Hubungan Diplomatik terhadap Kuba Tahun 2013-2016. *Universitas Mulawarman E-Journal*, 6(1).
- Uca.edu. (t.t). Anglo-Egyptian Sudan (1922-1956). [online]. Dalam: <https://uca.edu/politicalscience/dadm-project/middle-eastnorth-africapersian-gulf-region/anglo-egyptian-sudan-1922-1956/> [Diakses 24 Februari 2021].
- VOA (Voice of America). (2019). A Timeline of Key Events in Rule of Sudan's al-Bashir. [online] Dalam: <https://www.voanews.com/africa/timeline-key-events-rule-sudans-al-bashir> [Diakses 25 Februari 2021].
- Wahiduddin, W. (2020). Konflik Sudan dan Jatuhnya Rezim Omar Al-Bashir. *Jurnal Bahasa Arab*, 17(1), 50-67.
- Wahyudi, N., Basyar, M.H., Mashad, D. dan Ghafur, M.F. (2016). Problematika Kekuatan Politik Islam di Maroko, Sudan, dan Somalia. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 245–60.
- Wardani, B. K. (2020). Kebijakan Amerika Serikat Menghapus Embargo Ekonomi Sudan Pada Tahun 2017. Skripsi, Universitas Brawijaya.
- Xinhua. (2004). Sudan accuses Israel, Germany of involvement in Darfur conflict. [online] Dalam: <https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-accuses-israel-germany-involvement-darfur-conflict> [Diakses 25 Januari 2021]